

Perlindungan Konstitusional Terhadap Hak Atas Pendidikan Masyarakat

Penghayat Kepercayaan di Jepara

Nilna Elmuna dan Faizal Adi Surya

202120146@std.umk.ac.id dan faizal.adi@umk.ac.id

Abstrak

Indonesia sebagai negara multikultural memiliki berbagai macam keberagaman ras, suku, budaya, dan lain sebagainya. Penganut kepercayaan merupakan salah satu keberagaman agama atau kepercayaan yang perlu diakui keberadaannya. Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016, para penganut agama merasa hak-haknya telah diakui oleh negara. Namun, dalam hal pendidikan masih terjadi diskriminasi seperti porsi pembelajaran bagi penganut kepercayaannya sebagai penganut agama asli. Penelitian ini difokuskan pada dua hal, yaitu implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan kebijakan sekolah terkait diskriminasi terhadap penganut agama Sapta Darma, Subud, dan Kapribaden di Kabupaten Jepara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sosio-legal dengan cara menganalisis dan mengkaji efektivitas peraturan perundang-undangan dalam interaksi masyarakat. Pemahaman terhadap beberapa kajian dan teori memberikan dua hasil pembahasan. Pertama, Dinas Pendidikan Kabupaten Jepara masih kurang memperhatikan hak-hak siswa penganut agama asli dalam hal porsi pembelajaran. Kedua, kebijakan sekolah belum cukup dalam menekan potensi terjadinya diskriminasi terhadap siswa penganut agama asli. Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa dengan adanya perlindungan negara terhadap pemeluk agama asli, maka pemerintah berkewajiban untuk melindungi hak konstitusionalnya. Perlunya kebijakan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Jepara di bidang pendidikan untuk memenuhi hak konstitusional yang mampu menekan potensi terjadinya diskriminasi bagi peserta didik pemeluk agama asli.

Kata Kunci : Perlindungan Hak, Konstitusi, Pendidikan, Kepercayaan Masyarakat Adat, Kabupaten Jepara.

Abstract

Indonesia as a multicultural country has a variety of racial, ethnic, cultural, and other diversity. Indigenous faiths is one of the diversity of religions or beliefs that need to be recognized. After the Constitutional Court Decision Number 97/PUU- XIV/2016, believers feel that their rights have been recognized by the state. However, in terms of education there is still discrimination such as the portion of learning for their beliefs as indigenous faiths. This research focuses on two things, namely the implementation of Law Number 20 of 2003 concerning the National Education System and school policies related to discrimination against Sapta Darma, Subud, and Kapribaden believers in Jepara Regency. The method used in this research is socio- legal by analyzing and examining the effectiveness of laws and regulations in community interaction. An understanding of several studies and theories provides two discussion results. First, the Office of Education of Jepara Regency still pays less attention to the rights of indigenous faith students in terms of the learning portion. Second, school policies are not sufficient in suppressing the potential for discrimination against students of indigenous faiths. Based on the results of the discussion, it can be concluded that with the existence of state protection for indigenous faiths, the government is obliged to protect their constitutional rights. The need for policies from the Office of Education of Jepara Regency in the field of education to fulfill constitutional rights that are able to suppress the potential for discrimination for students of indigenous faiths.

Keywords : Rights Protection, Constitutional, Education, Indigenous Faiths, Jepara Regency.